

Laporan Kinerja

**DIREKTORAT PEMBIAYAAN
PERTANIAN**

Tahun 2014



*Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian*

KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2014 telah disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk memperpertanggungjawabkan kepada publik hasil kegiatan yang telah dilakukan baik tugas pokok maupun fungsi oleh Direktorat Pembiayaan. Laporan Akuntabilitas ini diharapkan bisa memberikan gambaran kinerja yang mencakup visi misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja baik kegiatan maupun keuangan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Direktorat Pembiayaan tahun 2014 antara lain mampu mendorong sumber-sumber pembiayaan untuk akses kepada petani, peternak dan pelaku agribisnis. Sumber sumber pembiayaan tersebut berasal baik dari perbankan, non perbankan melalui skim kredit program, kredit komersial maupun pembiayaan syariah.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan dalam pencapaian laporan ini meliputi : 1) penyusunan program dan rencana teknis Direktorat, 2) fasilitasi penyaluran kredit program untuk sektor pertanian, 3) berkembangnya fungsi kelembagaan petani di desa melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), penumbuhan fungsi kelembagaan ekonomi petani di gapoktan dengan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis sebagai unit usaha dalam keorganisasian gapoktan dan 4) upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap usaha petani dengan menyusun kebijakan melalui program asuransi pertanian.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini bisa memberikan informasi jelas dalam pelaksanaan program Direktorat Pembiayaan serta acuan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2015
Direktur Pembiayaan Pertanian,

Ir. Mulyadi Hendiawan, MM

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
TA. 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi perlu dilaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai implementasinya diantaranya harus disusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Dengan di susunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ini di harapkan memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Direktorat Pembiayaan Pertanian pada tahun 2014 dapat lebih efektif dan terukur.

Jakarta, Maret 2013

Direktur Pembiayaan
Pertanian,



Mulyadi Hendiawan *lh*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Sasaran	5
2.3. Strategi	6
2.4. Kebijakan dan Program.....	7
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN	9
3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan	9
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	10
BAB IV PENUTUP	12
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	13

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang besar dalam penyediaan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di perdesaan, penyedia bahan baku industri, dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Peran yang dilaksanakan oleh sektor pertanian, masih terkendala dengan masih tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh petani di perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 juta jiwa. Sekitar 17,77 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan kurang dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani yaitu kesulitan akses kepada fasilitas pembiayaan. Permasalahan pembiayaan disebabkan antara lain: (a) sistem dan prosedur penyaluran kredit dari perbankan masih rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi petani dan karakteristik pertanian; (b) usaha pertanian bagi perbankan mempunyai resiko tinggi sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian; (c) tidak adanya kemampuan petani untuk menyediakan agunan tambahan antara lain berupa sertifikat lahan, (d) lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition); dan (e) tidak adanya skim kedit khusus pertanian yang tersedia di perbankan.

Salah satu tantangan bagi Kementerian Pertanian untuk pembangunan pertanian perdesaan pada tahun 2010 – 2014 adalah membuka akses pembiayaan dengan menyediakan dan memfasilitasi sumber pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis, mulai dari petani skala kecil, menengah,

sampai skala besar, sekaligus memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif petani dalam upaya menjawab permasalahan ketersediaan pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh petani.

Program dan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. SAKIP memiliki komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi serta Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Dalam SAKIP dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja diperlukan Rencana Kinerja Tahunan, yang merupakan penjabaran dari renstra memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembiayaan pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di Lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian yang meliputi aspek pembiayaan program, pembiayaan agribisnis, kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis, pembiayaan syariah dan kerjasama.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 adalah tersusunnya RKT Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di Lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertanian, koordinasi, manajemen, dan administrasi.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah:

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2011-2014.
5. Renstra Direktorat Pembiayaan Pertanian 2011-2014

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah terwujudnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan berkembangnya kelembagaan keuangan mikro agribisnis.

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pembiayaan Pertanian mengembangkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan optimasi penyaluran kredit bersubsidi: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk mendukung percepatan revitalisasi tanaman perkebunan (sawit, kakao dan karet), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk mendukung pencapaian swasembada daging.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pertanian.
3. Mewujudkan fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani/peternakan (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani.
4. Mewujudkan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil-perdesaan.
5. Meningkatkan ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak/pekebun untuk mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
6. Mendorong peningkatan market share pembiayaan bagi hasil dari perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian.
7. Mendorong terbentuknya kebijakan asuransi pertanian yang memberikan perlindungan petani.

8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan asuransi dalam rangka pengembangan skim-skim kredit komoditas unggulan pertanian mulai dari hulu-budidaya-hilir, serta skim-skim yang mendorong industri pertanian.
9. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program PKBL, kerjasama optimasi dana SP-3, optimalisasi dana CSR (Corporate Social Responsibility).
10. Mewujudkan terbentuknya landasan hukum pembiayaan pertanian dalam bentuk Undang-undang Pembiayaan Pertanian dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar kepastian hukum penyediaan pembiayaan usaha petani.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau sesuai dengan karakteristik usaha pertanian dan berkembangnya kelembagaan keuangan mikro agribisnis, bertujuan untuk:

1. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan subsidi dan penjaminan dari pemerintah.
2. Meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
3. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan pemberdayaan gapoktan menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
4. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program PKBL dan CSR (Corporate Social Responsibility) serta lembaga keuangan lainnya.
5. Mewujudkan terbentuknya sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.

6. Mewujudkan terbentuknya Undang-undang Pembiayaan Pertanian serta turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Sasaran pelaksanaan pembangunan dan program kerja Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya optimalisasi penyaluran kredit bersubsidi KKP-E, KPEN-RP untuk mendukung percepatan revitalisasi tanaman perkebunan (sawit, kakao dan karet) KUPS untuk mendukung pencapaian swasembada daging.
2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan KUR untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pertanian.
3. Terwujudnya fasilitasi pembiayaan melalui program pemberdayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bagi petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, dan buruh tani.
4. Terwujudnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil perdesaan.
5. Meningkatnya ketersediaan subsidi kredit bagi petani/peternak/pekebun untuk mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan,
6. Meningkatnya kerjasama dengan pihak perbankan dan perusahaan asuransi dalam rangka pengembangan skim-skim kredit komoditas unggulan pertanian mulai dari hulu-budidaya-hilir, serta skim-skim yang mendorong industri pertanian.
7. Terwujudnya landasan hukum pembiayaan pertanian dalam bentuk Undang-undang Pembiayaan Pertanian dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar kepastian hukum penyediaan pembiayaan usaha petani.

2.3. Strategi

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian memiliki strategi sebagai berikut:

1. Good Governance

Melaksanakan manajemen fasilitasi pembiayaan yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan

penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang feasible dan bankable
Mendorong pemanfaatan portofolio ketersediaan dana dari bank baik melalui kredit program dan kredit komersial (KKP-E, KPEN-RP dan KUPS) untuk membiayai usaha pertanian.
3. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang feasible tidak bankable Mengoptimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian resiko kreditnya ditanggung oleh perusahaan penjamin dengan IJP dibayar oleh pemerintah.
4. Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok tani yang tidak feasible dan tidak bankable
 - a. Upaya menyediakan dan memberikan Bantuan Sosial (BLM) bagi gapoktan untuk ditransformasi menjadi LKM-A.
 - b. Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari gapoktan PUAP di perdesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

2.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan Direktorat Pembiayaan Pertanian yang terkait revitalisasi pembiayaan pertanian dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, kebijakan Direktorat Pembiayaan Pertanian fokus pada sumber pembiayaan dari:

1. Dana perbankan;
2. Dana laba BUMN/CSR (PKBL-BUMN);
3. Dana Lembaga Keuangan Non Bank;
4. Dana pihak swasta, dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian;
5. Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota);

6. Dana lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta
7. Sumber pembiayaan lainnya.

Program Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah: Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan indikator kinerja utama adalah:

1. Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha
2. Jumlah penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh Perbankan
3. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR sektor pertanian) oleh Perbankan
4. Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian
5. Jumlah (LKM-A) meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM-PUAP melalui pelatihan

Indikator kinerja untuk masing-masing aspek yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembiayaan Pertanian mencakup pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerjasama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.

III. PERENCANAAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program.

Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah: Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dalam Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terdapat sub kegiatan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebagai sumber pembiayaan bagi usaha petani/skala kecil dan buruh tani yang tidak layak menurut bank melalui penguatan modal gapoktan.
2. Meningkatkan penyaluran KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS sebagai sumber pembiayaan petani dengan suku bunga rendah karena adanya subsidi suku bunga kredit;
3. Meningkatkan penyaluran kredit dengan penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan sesuai budaya setempat.
5. Mengembangkan mitigasi risiko usaha pertanian bagi petani melalui Asuransi Pertanian.

6. Menyiapkan dan mewujudkan rumusan kebijakan pembiayaan pertanian yang dituangkan dalam Undang-undang sebagai upaya memberikan kepastian sumber dan pola pembiayaan sector pertanian.

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam Kegiatan Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diprioritaskan untuk mendukung Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah TA. 2014.

Sasaran strategis yang disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian tahun 2014 adalah Meningkatnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP, kredit program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dari Direktorat Pembiayaan tahun 2014 maka upaya utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya Lembaga Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Terfasilitasinya Gapoktan dengan dana penguatan Modal Usaha BLM-PUAP sebanyak 3.000 Gapoktan
2. Penyediaan kredit program (KKP-E dan KUR sektor pertanian) oleh perbankan.
 - a. Terealisasinya penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh perbankan sebesar Rp. 2 trilyun.
 - b. Terealisasinya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian oleh perbankan sebesar Rp. 4 trilyun.
3. Terealisasinya model pelaksanaan asuransi pertanian melalui pilot project seluas 3.000 Ha

4. Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP, sebagai unit pembiayaan petani perdesaan

Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola dana melalui LKM-A sebanyak 50 LKM-A

Indikator kinerja utama dari Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 untuk mendukung meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 adalah Penyaluran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada lahan sawah seluas 40.067 Ha.

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2014 merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat Pembiayaan Pertanian serta dapat menyatukan operasionalisasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pembiayaan pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dalam jangka waktu satu tahun untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, sehingga hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembiayaan Pertanian

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP, kredit program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	1. Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha	3.000 Gapoktan
	2. Jumlah penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh Perbankan	Rp. 2 Trilyun
	3. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR sektor pertanian) oleh Perbankan	Rp. 5 Trilyun
	4. Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian	3.000 Ha
	5. Jumlah (LKM-A) meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM-PUAP melalui pelatihan	50 LKMA



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Mulyadi Hendiawan, MM
Jabatan : Direktur Pembiayaan Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai format perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2014

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sumarjo Gatot Irianto

Mulyadi Hendiawan

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pembiayaan Pertanian

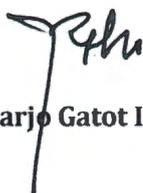
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya fasilitasi dukungan pembiayaan bagi petani melalui terlaksananya panyaluran dana BLM-PUAP, kredit program, asuransi dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	1. Jumlah terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha	1.713 Gapoktan
	2. Jumlah penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh Perbankan	Rp. 2 Trilyun
	3. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR sektor pertanian) oleh Perbankan	Rp. 5 Trilyun
	4. Jumlah model pelaksanaan asuransi pertanian	3.000 Ha
	5. Jumlah (LKM-A) meningkat kemampuannya dalam mengelola dana BLM-PUAP melalui pelatihan	50 LKMA

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP): Rp. 240.291.334.000

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,


Sumarjo Gatot Irianto

Jakarta, Agustus 2014
Direktur Pembiayaan Pertanian


Mulyadi Hendiawan